



# **BUPATI KARANGANYAR**

## **PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa perlu diatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 65).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2011

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011;
- b. Lampiran II : Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011;
- c. Lampiran III : Penetapan Klasifikasi Desa dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2011;
- d. Lampiran IV : Daftar Desa Penerima Bantuan Pembangunan Balai Desa / Gedung Serba Guna / Pagar Balai Desa / Talud / Gapuro Balai Desa Tahun 2011;
- e. Lampiran V : Daftar Desa Penerima Bantuan Kegiatan Bangun Desa Tahun 2011;
- f. Lampiran VI : Daftar Desa Penerima Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan Tahun 2011;

- g. Lampiran VII : Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Untuk Desa Berkembang Tahun 2011;
- h. Lampiran VIII : Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan untuk Sarana Prasarana Kearsipan Tahun 2011;
- i. Lampiran IX : Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Tahun 2011;

**Pasal 2**

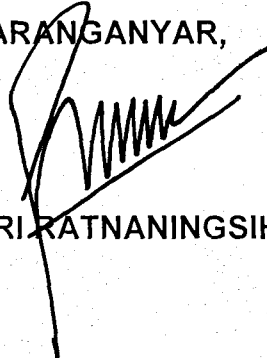
Dengan telah diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Pengelolaan Anggaran Kelurahan Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Januari 2011

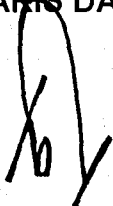
**BUPATI KARANGANYAR,**



**Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**



**Drs. KASTONO DS, MM**

NIP. 19540809 197903 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN 2011**

**I. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)**

**A. PENGERTIAN**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja dan Pembiayaan;
2. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
3. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
4. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
6. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa;
7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bcbot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu;
8. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
9. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
10. Desa Klasifikasi A adalah desa yang berdasarkan hasil perhitungan tolok ukur klasifikasi desa memiliki nilai skor variabel sampai dengan 800;
11. Desa Klasifikasi B adalah desa yang berdasarkan hasil perhitungan tolok ukur klasifikasi desa memiliki nilai skor variabel diatas 800;
12. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa;
13. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa;
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat SILPA Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
15. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
16. Belanja Tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
17. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;

18. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa;
19. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang penghasilannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
20. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
21. Jasa Pengabdian adalah hak atas sejumlah uang yang diberikan kepada mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa atau ahli warisnya atas pengabdian yang telah dilaksanakan oleh mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa;
22. Keluarga Miskin adalah suatu situasi/kondisi yang dialami oleh suatu keluarga yang tidak mampu menyelenggarakan hidup keluarganya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.

## **B. MEKANISME.**

### **1. Mekanisme Penyusunan APB Desa terdiri dari :**

Persiapan :

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKP Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa meliputi Rancangan;
  - 1) Naskah APB Desa,
  - 2) Lampiran I Ringkasan APB Desa
  - 3) Lampiran II Rincian APB Desa
  - 4) Lampiran III Penjabaran APB Desa;
  - 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh Persetujuan.
- d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD yang terdiri dari Rancangan :
  - 1) Naskah APB Desa;
  - 2) Lampiran I Ringkasan APB Desa;
  - 3) Lampiran II Rincian APB Desa;
  - 4) Lampiran III Penjabaran APB Desa;untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai dengan Surat Pengantar dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Desa.
- e. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- f. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diterima BPD.
- g. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan bersama, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

- h. Dalam melaksanakan APB Desa Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf g Kepala Desa terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui Camat.

## **2. Evaluasi**

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- b. Hasil Evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan paling lama 20 (duapuluh) hari kepada Kepala Desa.

## **3. Penetapan**

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dari Bupati, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dan selanjutnya diundangkan dalam Berita Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Atas Nama Sekretaris Daerah;
- b. Peraturan Desa yang telah diundangkan ke dalam Berita Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan Tembusan Inspektur, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Camat.

## **C. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DESA**

### **1. Pendapatan**

**Pendapatan Desa terdiri dari :**

#### **a. Pendapatan Asli Desa;**

- 1) Hasil Usaha Desa;
- 2) Hasil Kekayaan Desa;
- 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
- 4) Hasil Gotong Royong;
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;

#### **b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :**

- 1) Bagi Hasil Pajak Daerah terdiri dari ;
  - a) Desa Klasifikasi A diberikan Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 5.246.913,-
  - b) Desa Klasifikasi B diberikan Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 6.456.590,-
- 2) Bagi Hasil Retribusi Daerah terdiri ;
  - a) Desa Klasifikasi A diberikan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.246.913,-
  - b) Desa Klasifikasi B diberikan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 6.456.590,-

**Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :**

- 1) Bantuan biaya pengobatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa.

### c. Alokasi Dana Desa (ADD)

#### 1) Maksud dan Tujuan

##### a) Maksud

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

##### b) Tujuan

(1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;

(2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

(3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

(4) mendorong peningkatan swadaya gotong – royong masyarakat desa.

#### 2) Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

a) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;

b) Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;

c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;

d) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip ekonomis, efektif, efisien, terarah, dan terkendali.

#### 3) Sumber Dana dan Jumlah ADD

a) Jumlah ADD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

b) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi belanja pegawai paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diperuntukan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil;

c) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud dalam huruf b) adalah adanya pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60 % (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

d) Pembagian secara adil sebagaimana dimaksud dalam huruf b) adalah adanya pembagian dari ADD secara proporsional untuk setiap desa yaitu sebesar 40 % (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);

- e) Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

#### 4) Penggunaan ADD

- a) ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% (tiga Puluh Perseratus) dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD, sedangkan yang sejumlah 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

- b) Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a), sebesar 30 % digunakan untuk :

- (1) Biaya operasional Pemerintah Desa sebesar 65% (enam puluh lima persen) dipergunakan antara lain untuk :

- A) Penguatan kapasitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 2.000.000,-
- B) Belanja perlengkapan dan peralatan kantor
- C) Belanja ATK
- D) Belanja rapat-rapat
- E) Belanja operasional kantor lainnya

- (2) Operasional dan tunjangan BPD sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dipergunakan antara lain untuk : Tunjangan pimpinan dan anggota BPD, Pengembangan SDM, perjalanan dinas, biaya rapat dan ATK

- (3) Biaya Operasional Tim Pelaksana ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dipergunakan antar lain untuk : honorarium, makan minum rapat, perjalanan dinas dan ATK

- c). Pemberdayaan masyarakat desa sejumlah 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf a), digunakan untuk :

- 1) Pemberdayaan lingkungan, utamanya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan baik dibidang ekonomi, sosial serta sarana dan prasarana desa yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong percepatan kemajuan Desa;

- 2) Pemberdayaan masyarakat desa, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan peranan pengarusutamaan gender

- 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha kecil, pengembangan unit ekonomi desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Tani dan Peternak serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat lainnya;

- 4) Bantuan Keuangan kepada lembaga desa, seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LINMAS untuk keperluan pemberdayaan lembaga yang bersangkutan.

#### 5) Pembobotan Desa

- a) Penetapan bobot desa dengan mempertimbangkan nilai (skor) variabel yang terdiri dari variabel utama dan variabel tambahan;

- i) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang diketuai oleh Kepala Desa dan keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat.
- j) Pembentukan Tim Pelaksana Tingkat Desa dilakukan dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, LPMD, BPD dan Tokoh Masyarakat.
- k) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
  - (1) Unsur Pemerintah Desa 3 (tiga) orang yang terdiri dari ; Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa/Plh. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris; dan 1 (satu) orang perangkat desa sebagai Anggota
  - (2) Tokoh masyarakat/Lembaga Masyarakat Desa sebanyak 2 (dua) orang sebagai Anggota.
- l) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf (l) dan huruf (m), memiliki tugas sebagai berikut
  - (1) menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD yang melibatkan BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan tingkat dusun yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - (2) mensosialisasikan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD kepada warga masyarakat melalui rapat atau pertemuan atau pengumuman;
  - (3) membuat jadwal rencana pencairan dana;
  - (4) mengelola ADD secara efektif, efisien dan transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
  - (5) melaksanakan kegiatan ADD sesuai Program Kerja Pemerintah Desa;
  - (6) mempertanggungjawabkan pelaksanaan ADD secara fisik dan administrasi;
  - (7) menyusun Laporan Semester dan Laporan Tahunan Pelaksanaan ADD di wilayahnya kepada Tim Pendamping.

8) Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

- a) Pengajuan pencairan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diundangkan.
- b) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD yang telah diverifikasi Camat kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Camat
- c) Permohonan sebagaimana dimaksud huruf (b) disampaikan melalui Camat dengan dilengkapi berkas yang diperlukan.
- d) Berkas sebagaimana dimaksud huruf (c) adalah :
  - (1) Untuk pencairan tahap pertama pada tahun 2011 sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari ADD:
    - A) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahap I tahun 2011 yang telah diverifikasi/diteliti oleh Tim Pendamping;
    - B) Peraturan Desa tentang APBDesa beserta dokumen APB Desa Tahun 2011 yang sudah diundangkan oleh Kepala Desa;
    - C) Foto copy rekening Kas Desa;
    - D) Pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap II tahun 2011 beserta kewajiban pajak yang harus dibayar;
    - E) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2010;
    - F) Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan ADD Tahap I Tahun 2011 sesuai ketentuan yang berlaku;

- G) Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan membayar pajak dari kegiatan ADD Tahap I Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pencairan tahap kedua tahun 2011 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari ADD :
- A) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahap II tahun 2011 yang telah diverifikasi/diteliti oleh Tim Pendamping;
  - B) Pertanggungjawaban ADD Tahap I Tahun 2011 beserta kewajiban pajak yang harus dibayar yang sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping maupun Tim Teknis Fasilitasi;
  - C) Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan ADD Tahap II Tahun 2011 sesuai ketentuan yang berlaku;
  - D) Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan membayar pajak dari kegiatan ADD Tahap II Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - E) Laporan pelaksanaan ADD Tahap I Tahun 2011
- e) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Karanganyar meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, setelah diadakan penelitian secara teknis oleh Tim Teknis Fasilitasi.
- f) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar menyalurkan ADD dengan mekanisme pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa di PD. BPR-BKK atau BKK setempat, sepanjang berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat.
- g) PD. BPR-BKK atau BKK dilarang melayani pencairan ADD apabila Desa yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana huruf (d) dan atau kewajiban pertanggungjawaban penggunaan Dana ADD sebelumnya sesuai dengan surat pemberitahuan dari Tim Teknis Fasilitasi.
- h) Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri dengan :
- (1) Rencana Kebutuhan Dana (RKD) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
  - (2) Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan anggaran dari Kepala Desa;
  - (3) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap penggunaan dana sebelumnya.
- i) Sekretaris Desa meneliti berkas kelengkapan SPP dari Bendahara Desa, setelah berkas dinyatakan lengkap dan sah, paling lambat 2 (dua) hari Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui Camat dan apabila berkas SPP dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah, Sekretaris Desa dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak diterima dikembalikan berkas pengajuan SPP kepada Bendahara Desa untuk dilengkapi dan direvisi;
- j) Setelah berkas dinyatakan lengkap dan sah Camat selaku Ketua Tim Pendamping mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana;
- k) Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat rekomendasi Camat mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa (PD. BPR-BKK)
- l) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan desa dibukukan dalam Buku Kas Umum Desa (BKU), selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan

9) Pelaporan ADD

- a) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat laporan semesteran dan Laporan Tahunan ADD kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi melalui Camat.
- b) Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD;
- c) Sistematika Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II PROGRAM KERJA ADD  
BAB III PELAKSANAAN ADD  
BAB IV PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH  
BAB V PENUTUP.
- d) Penyampaian Laporan Semester dan Laporan Tahunan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana kepada Tim Pendamping kemudian Tim Pendamping membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi.
- e) Laporan Semester dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pendamping paling lambat tanggal 10 bulan Juli dan Laporan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- f) Camat selaku Ketua Tim Pendamping setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf (e) membuat rekapitulasi laporan dan paling lama 6 (enam) hari kerja disampaikan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi.

10) Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

11) Pembinaan dan Pengawasan ADD

Pembinaan atas pelaksanaan ADD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan Camat.

- a) Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati atau Inspektorat Kabupaten, Camat dan BPD.
- b) Pengawasan yang dilakukan BPD merupakan pengawasan yang menyangkut kebijakan anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.

12) Besaran ADD tahun 2011

Besarnya ADD tahun 2011 yang diberikan kepada Pemerintah Desa dengan pembagian secara proporsional berdasarkan pembobotan yang jumlahnya masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.2

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa ;

- 1) Bantuan Pemerintah;
- 2) Bantuan Pemerintah Provinsi;

a) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Perkantoran

(1) Maksud dan Tujuan

- A) Mendukung percepatan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- B) Mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat.
- C) Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi desa.

(2) Alokasi Bantuan

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- masing-masing desa.

(3) Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

- A) Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) digunakan untuk peningkatan sarana perkantoran Pemerintah Desa yang antara lain meliputi :
  - i meja kursi kerja;
  - ii kursi ruang tunggu pelayanan;
  - iii seperangkat komputer;
  - iv almari buku;
  - v sound system;
  - vi laptop;
  - vii papan monografi;
  - viii papan pengumuman/informasi.
- B) Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimaksud tidak diperkenankan untuk ATK dan barang pakai habis

(4) Mekanisme Pencairan Dana.

- A) Persyaratan pencairan dana disusun oleh Desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
  - i permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;
  - ii permohonan pada huruf i dilengkapi dengan:
    - 4 (empat) lembar kwitansi, 1 (satu) bermeterai Rp. 6.000,- dan 3 (tiga) rangkap (bukan fotocopy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
    - RPD bantuan dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 4);
    - Fotocopy buku rekening kas desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng (rangkap 4).
- B) Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi termasuk SPJ tahun 2010 harus sudah dilaporkan;
- C) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana bantuan untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi Bupati;
- D) Pengajuan pencairan dari Bupti disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi administrasi;
- E) Pengajuan Bantuan Keuangan yang telah diverifikasi oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.

(5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2011 melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

b) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Desa Berkembang.

(1) Maksud dan Tujuan

- A) Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif yang ada di desa
- B) Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa
- C) Pengembangan potensi perekonomian dan usaha produktif masyarakat pedesaan
- D) mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
- E) Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- F) Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada SKPD terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi desa

(2) Alokasi Bantuan

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Desa Berkembang tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk setiap desa sebanyak 13 Desa se Kabupaten Karanganyar yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

(3) Sasaran

Warga atau kelompok masyarakat di desa berkembang yang akan dan telah memiliki usaha ekonomi produktif, bertekad untuk meningkatkan kesejahteraannya dan sanggup mengembangkan modal stimulan secara bergulir

(4) Kebijakan Bantuan Keuangan

- A) Bantuan bersifat stimulan dan merupakan dana abadi/lestari
- B) Bantuan ditransfer 100% langsung ke Kas Pemerintah Desa
- C) Bantuan bersifat bergulir dikelola secara kelompok dan pola pengembangannya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes)

(5) Mekanisme Penyusunan Kegiatan

- A) Kepala Desa melaksanakan pertemuan untuk menggali potensi, permasalahan dan kebutuhan desa melalui Forum Musyawarah Desa
- B) Prioritas usulan berupa kegiatan yang dapat mendorong pengembangan ekonomi masyarakat desa yang segera dapat dilihat dan dimanfaatkan hasilnya
- C) Bantuan keuangan diberikan dalam bentuk uang untuk pengembangan modal usaha dengan model penggalangan yang pola pengembangannya sudah dilampirkan dalam proposal
- D) Pemilihan jenis kegiatan agar benar-benar disesuaikan dengan potensi desa. Pemilihan jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan potensi akan berakibat fatal/mengalami kerugian

(6) Penggunaan Bantuan Keuangan

- A) Jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :
  - i bidang pertanian dan hortikultura

- ii bidang peternakan ( tidak diperbolehkan untuk pembelian sapi dan kerbau)
- iii bidang perikanan]
- iv pengembangan modal usaha (industri kecil/rumah tangga, perdagangan dan jasa)
- v usaha ekonomi produktif lain sesuai potensi desa

B) Bantuan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maximal 7,5%) dengan penggunaan antara lain:

- i belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, fotocopy, penjiilidan, proposal dan pelaporan)
- ii belanja makan dan minum rapat
- iii belanja perjalanan dinas

C) Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan honorarium.

(7) Mekanisme pengajuan kegiatan

- A) LPMD menyusun proposal kegiatan dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan pemangku kepentingan yang terkait serta disahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD untuk disampaikan kepada Camat
- B) Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.
- C) Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan verifikasi teknis pendahuluan usulan jenis kegiatan sesuai potensi riil desa dan direkap untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah, kegiatan verifikasi teknis proposal bertujuan untuk mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan, sinkronisasi usulan kegiatan, pengendalian dan sebagai acuan/dasar bagi kelompok dalam pelaksanaan dalam kegiatan.
- D) Bupati merekomendasikan rekapitulasi hasil verifikasi teknis usulan jenis kegiatan setelah diteliti kelengkapannya oleh Tim Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah
- E) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah merekap usulan proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan desa, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

(8) Mekanisme Pencairan Dana

- A) Dana Bantuan ditransfer langsung 100% ke Rekening Kas Desa
- B) Persyaratan pencairan dana disusun oleh desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
  - i Permohonan pencairan dana yang ditanda tangani dan distempel basah oleh Kepala Desa berdaangkutan;
  - ii Lampiran terdiri dari :
    - 5 (lima) lembar kwitansi, 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 4 (empat) kwitansi rangkap (bukan fotocopy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
    - Proposal penggunaan dana bantuan (rangkap 3);
    - Fotocopy buku rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng (rangkap 5).

- C) Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi dan diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah persyaratan seluruh desa dalam 1 (satu) Kabupaten terpenuhi

(9) Pertanggungjawaban

- A) Pertanggungjawaban bantuan keuangan berupa laporan akhir disampaikan melalui Bupati Kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 30 November 2011

- B) Laporan sebagaimana dimaksud ( huruf A ) meliputi :

- i Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 3)
- ii Realisasi penggunaan dana sesuai rencana dalam proposal yang dilengkapi dengan fotocopy kwitansi/nota pembelian (rangkap 3)
- iii Kepala Desa penerima bantuan keuangan wajib melaporkan perkembangan dan perguliran bantuan tersebut setiap akhir tahun kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar

- c) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Kearsipan

(1) Maksud dan Tujuan

- A) Mendukung percepatan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- B) Mendukung terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Desa pad bidang kearsipan
- C) Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi desa.

(2) Alokasi Bantuan

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dengan nilai bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- untuk setiap desa sebanyak 37 Desa se Kabupaten Karanganyar yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII

(3) Perencanaan

Prioritas usulan adalah kegiatan yang dapat mendukung kegiatan penataan arsip desa untuk peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa bidang kearsipan meliputi pembelian :

- A) filling cabinet
- B) box arsip
- C) kartu kendali
- D) folder / map gantung
- E) sekat I, II, III untuk penataan berkas

3) Mekanisme Pencairan Dana

- A) Dana bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening kas desa
- B) Persyaratan pencairan dana disusun oleh desa penerima bantuan yang terdiri dari :

- i Permohonan pencairan dana yang ditanda tangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan (rangkap 5)
- ii Kwitansi terdiri dari :
  - \* 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian sarpras kearsipan dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah serta bermaterai cukup
  - \* 3 (tiga) lembar kwitansi rangkap pembelian sarpras kearsipan (bukan fotocopy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel basah
  - \* proposal penggunaan dana bantuan (rangkap 3)
  - \* foto copy buku rekening kas desa pada PT. Bank Jateng
- C) Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi
- D) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kearsipan melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana bantuan untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi Bupati
- E) Pengajuan pencairan dari Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi administrasi
- F) Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut

#### (4) Pertanggungjawaban

- A) Pertanggungjawaban bantuan keuangan berupa laporan akhir disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan tembusan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 31 Desember 2011
- B) Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud

#### d) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bidang Kesehatan

##### (1) Maksud dan Tujuan

###### A) Tujuan umum

Meningkatkan peran serta masyarakat melalui Forum Kesehatan Desa (FKD) untuk ikut serta mengidentifikasi masalah kesehatan sehingga tercipta kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini serta tindakan cepat oleh masyarakat terhadap masalah kesehatan prioritas

###### B) Tujuan khusus

Terkoordinasinya penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengamatan penyebab masalah kesehatan dan pemecahan masalah kesehatan prioritas di desa oleh FKD, melalui fungsinya dan peranannya FKD dalam menangani masalah kesehatan prioritas dengan:

- i Kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) masalah kesehatan prioritas, sebagai outputnya identifikasi masalah dalam bentuk pembuatan peta
- ii Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat seminggu sekali sesuai prosedur yaitu fokus terjadwal dan teratur dengan menggunakan PSN kt dan pencegahan malaria dengan penggunaan kelambu celub
- iii Pemberian Makanan tambahan (PMT) balita di posyandu
- iv Pencegahan Diare oleh masyarakat melalui peningkatan akses jamban keluarga

(2) Alokasi Bantuan

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dengan nilai bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- untuk setiap desa sebanyak 13 Desa se Kabupaten Karanganyar yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI

(3) Kebijakan Dana Bantuan Keuangan

- A) Dana Bantuan ditransfer langsung 100% ke Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng cabang setempat.
- B) Bantuan bersifat stimulan

(4) Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

- A) Persiapan dan pelaporan kegiatan di desa sebesar 10% dari anggaran yang tersedia di desa yaitu sebesar 10% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 1.500.000,- dapat digunakan untuk keperluan persiapan seperti rapat koordinasi tingkat desa termasuk pengamatan penyebab/faktor resiko (Community Based Survelance) masalah kesehatan oleh FGD melalui Survey Mawas Diri dengan pembuatan peta, rapat penyusunan proposal dan pelaporan (pembelian konsumsi, fotocopy, alat tulis kantor, materai), perjalanan dias/transport konsultasi ke puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten, biaya pengiriman laporan
- B) Stimulan tindak lanjut dari hasil pemetaan di desa yang diprioritaskan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah, malaria, gusi buruk dan diare. Besarnya stimulan Rp. 13.500.000,- dapat digunakan untuk satu atau lebih tindakan stimulan sesuai permasalahan desa dengan perincian masing-masing unit kegiatan sebagai berikut :
  - i stimulan pencegahan demam berdarah dan malaria berupa :
    - \* PSN Kit (senter+baterai, obat oles anti nyamuk, format pelaporan PSN) sebesar Rp. 50.000,-/ set
    - \* dan atau kelambu celub Rp. 100.000,-/ buah
  - ii stimulan PMT (Pemberian Makan Tambahan) Balita di Posyandu :
    - \* PMT berupa makan lokal dalam bentuk makanan ringan/makanan setempat
    - \* setiap porsi PMT mengandung 200-300 kalori dan 5-7 gram protein (setara dengan satu mangkuk bubur kacang ijo)
    - \* penyamaan informasi kepada ibu-ibu pengunjung posyandu tentang pembuatan menu makanan lokal yang bergizi
    - \* Sasaran PMT adalah balita di Posyandu
    - \* penggunaan anggaran untuk PMT : 1 kali kegiatan @ Rp. 250.000,-= maksimal 6 kali kegiatan dalam kurun waktu 6 bulan per posyandu
  - iii stimulan pembelian paket material jamban keluarga:
    - \* berupa paket material pembuatan jamban keluarga sebesar Rp. 750.000,- per unit
    - \* pembelian material jamban keluarga berupa : kloset, bis beton Ø = 80 cm T=1 m, pralon = Ø 4 inch dan Ø ¾ inch, elbow, lem, besi (Ø=0,8 cm), semen, batu bata
    - \* material diatas dapat ditambah material lainnya jika diperlukan; sepanjang satuan harga per unit jamban tidak melebihi ketentuan
    - \* Kriteria penerima bantuan jamban keluarga adalah keluarga miskin yang belum memiliki jamban dan tersedia/terdapat akses air bersih
    - \* biaya pembuatan jamban dan rumah jamban keluarga ditanggung oleh penerima bantuan dan atau swadaya masyarakat desa

(5) Mekanisme Pencairan Dana

- A) Surat Permohonan Pencairan Dana per desa yang ditandatangani dan distempel basah oleh Koordinator FKD, Kepala Desa bersangkutan, diketahui oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebanyak rangkap 4 (2 untuk Biro Keuangan Setda Jateng, 1 arsip Dinas Kesehatan Provinsi dan 1 arsip desa)
- B) Kwitansi terdiri dari : 1 (satu) kwitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- , 4 (empat) lembar kwitansi rangkap (bukan foto copy) seluruhnya ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah
- C) Fotocopy Buku Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng cabang setempat sebanyak rangkap 4
- D) Proposal penggunaan dana bantuan
- E) Pencairan Dana Bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi dan dilakukan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ke Biro Keuangan Sekda Provinsi Jawa Tengah setelah persyaratan seluruh desa dalam 1 (satu) Kabupaten terpenuhi

(6) Pertanggungjawaban

- A) Pertanggungjawaban bantuan keuangan berupa laporan akhir disampaikan melalui Bupati Kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 30 November 2011
- B) Laporan sebagaimana dimaksud ( huruf A ) meliputi :
  - i Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 3)
  - ii Realisasi penggunaan dana sesuai rencana dalam proposa yang dilengkapi dengan fotocopy kwitansi/nota pembelian (rangkap 3)
- e) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa kegiatan :
  - (1) TMMD Sengkuyung I sebesar Rp. 157.500.000,- untuk Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso
  - (2) TMMD Sengkuyung II sebesar Rp. 157.500.000,- untuk Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso
- f) Bantuan Keuangan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Propinsi.

**3) Bantuan Pemerintah Kabupaten.**

- a) Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Penghasilan Tetapnya belum sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b) Bantuan Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
  - (1) Kades            12 x Rp.320.000,- =            Rp. 3.840.000,-
  - (2) Sekdes        12 x Rp.265.000,- =            Rp. 3.180.000,-
  - (3) Kasi/Kaur     12 x Rp.145.000,- =            Rp. 1.740.000,-
  - (4) Kadus         12 x Rp.145.000,- =            Rp. 1.740.000,-
  - (5) Pemb.Kaur    12 x Rp.145.000,- =            Rp. 1.740.000,-

- c) Bantuan Pembangunan Balai Desa / Gedung Serba Guna / Pagar Balai Desa / Talud / Gapuro Balai Desa Tahun 2011. Besaran bantuan untuk masing-masing Desa yang menerima bantuan seperti dalam Lampiran IV

Tahapan Pencairan

- (1) Dana bantuan akan dilakukan pencairan secara bertahap yaitu Tahap Pertama sebesar 60 % dan Tahap Kedua sebesar 40%. Pengambilan bantuan Tahap Kedua sebesar 40 % harus disisakan sejumlah 10 % di rekening kas desa dan dapat diambil apabila kegiatan dan SPJ telah diselesaikan. Pengambilan sisa dana tersebut harus dengan surat pernyataan Kepala Desa bahwa kegiatan dan SPJ telah diselesaikan di ketahui Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku penanggungjawab bantuan.

(2) Persyaratan Pencairan

A). Persyaratan pencairan Tahap Pertama sebesar 60% adalah sebagai berikut :

- i. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
- ii. Proposal pengajuan Bantuan yang diketahui Camat dilampiri dengan :
  - \* Gambar / Desain rencana kegiatan yang dibuat/diketahui Dinas Teknis Terkait dan ditanda tangani oleh Kepala Kepala Desa/Lurah.
  - \* Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat /diketahui Dinas Teknis Terkait dan ditanda tangani oleh Kepala Kepala Desa/Lurah.
  - \* Foto kondisi awal 0 %
- iii. Penggunaan Dana (RPD) Bantuan sejumlah 60% sesuai dengan DPA APB Desa
- iv. Foto copy rekening Kas Desa.
- v. Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan Dana Bantuan sesuai ketentuan yang berlaku dan sanggup membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

B). Persyaratan pencairan Tahap Kedua sebesar 40% adalah :

- i. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
- ii. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan ((SPJ) Tahap I sebesar 60% lengkap dengan Foto Kegiatan dan Bukti Surat Setoran Pajak yang harus dibayar ;
- iii. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Rehab Balai/Kantor Desa/Kelurahan Tahap II sebesar 40%.
- iv. Rekomendasi Camat bahwa pencairan 40% dana bantuan dapat diberikan kepada desa yang bersangkutan

C). Mekanisme Pencairan

- i. Camat mengirim berkas pengajuan Bantuan Rehab Balai/Kantor Desa/ kepada bupati Cq.Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar guna pencairan dana Bantuan Rehab Balai/Kantor Desa dari rekening Kas Daerah.

- ii. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mengajukan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) sepanjang telah memenuhi persyaratan.
- iii. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar menyalurkan dana Bantuan Rehab Balai/Kantor Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa di PD. BPR-BKK/BKK setempat, sepanjang berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat.
- iv. Selanjutnya untuk pencairan dana dari rekening Kas Desa di PD BPR-BKK/BKK diatur sebagai berikut :
  - \* Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - \* Sekretaris Desa meneliti berkas kelengkapan SPP dari Bendahara Desa, setelah berkas dinyatakan lengkap dan sah, paling lambat 2 (dua) hari Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan apabila berkas SPP dinyatakan tidak lengkap dan sah, Sekretaris Desa dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari mengembalikan berkas pengajuan SPP kepada Bendahara Desa untuk dilengkapi;
  - \* Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa (PD. BPR-BKK/BKK)
  - \* Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan Desa, dibukukan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.
- v. Pimpinan Kegiatan mempertanggung jawabkan penggunaan uang dalam bentuk SPJ yang lengkap dan sah diserahkan kepada Bendaharawan Desa.

D). Pengendalian Dan Pengawasan

- i. Kepala Desa wajib membuat pertanggung jawaban penggunaan dana paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kepada Bupati melalui Camat.
- ii. Pembinaan atas pelaksanaan Bantuan Rehab Balai /Kantor Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten dan Camat.
- iii. Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Rehab Balai / Kantor Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten dan BPD.
- iv. Pengawasan yang dilakukan BPD merupakan pengawasan yang menyangkut kebijakan anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.

d) Bantuan Kegiatan Bangun Desa

(1) Maksud dan Tujuan

Salah satu faktor penyebab hambatan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan adalah buruknya/rendahnya pembangunan infrastruktur perdesaan yang merata di wilayah perdesaan Kabupaten Karanganyar. Kegiatan Bangun Desa dititikberatkan pada pembangunan prasarana perdesaan yang mendukung kegiatan perekonomian khususnya serta kelancaran transportasi baik transportasi antar desa maupun transportasi dari desa ke kota yang berorientasi pada kegiatan ekonomi produktif.

(2) Alokasi Bantuan

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dengan nilai bantuan sebesar Rp. 30.000.000,- untuk setiap desa sebanyak 27 Desa se Kabupaten Karanganyar yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

(3) Pemanfaatan Dana

- A) Bantuan diberikan untuk membangun atau memperbaiki kualitas sarana dan prasarana fisik lingkungan
- B) Bantuan dioptimalkan penggunaannya dimana persiapan, perencanaan dan pengawasan serta pajak menjadi tanggungjawab penerima bantuan
- C) Kepentingan langsung bagi masyarakat
- D) Bantuan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat berupa swadaya tenaga, uang maupun material

(4) Kegiatan yang dilarang

- A) Kegiatan untuk pembangunan tempat ibadah
- B) Pembangunan gedung kantor atau balai pertemuan
- C) Deposito atau berkaitan dengan usaha menumpuk bunga bank
- D) Pembebasan lahan
- E) Kegiatan yang berdampak negatif (sifatnya politis / kampanye kelompok tertentu ) terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal
- F) Kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan
- G) Dilarang untuk honor/insentif pemerintah desa/perangkat desa, pengurus maupun anggota tim

(5) Pembuatan Proposal Rencana Kegiatan

Kegiatan Bangun Desa supaya teridentifikasi dalam bentuk dokumen maka Kepala Desa membentuk Panitia Pembangunan Bangun Desa di tingkat desa yang salah satu tugasnya membuat Proposal Bangun Desa. Adapun proposal tersebut mencakup latar belakang, Rencana Kegiatan Bangun Desa (RKBD), Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, jadwal rencana pelaksanaan kegiatan yang dirangkai dalam proposal dilampiri foto 0%.

A) Rencana Kegiatan Bangun Desa (RKBD)

Panitia pembangunan bersama dengan Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk memusyawarahkan rencana sasaran fisik kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- i Lokasi rencana pengerjaan fisik
- ii Rencana jenis fisik yang dikerjakan : cor jalan, aspal jalan, talud dll
- iii Volume fisik

B) Penyusunan RAB

RAB untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sehingga perlu disusun secara bersama-sama melalui musyawarah panitia pembangunan yang meliputi : Jenis pengeluaran, volume, harga satuan dan jumlah

- C) Penyusunan Jadwal Rencana  
Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan diperlukan agar kegiatan mempunyai target perencanaan dan tanggungjawab pelaksanaan sehingga tepat waktu (mulai dan selesai)
- D) Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat Laporan Penggunaan Dana yang ditandatangani ketua kelompok/panitia

(6) Pencairan Dana

Dana Bantuan Bangun Desa dicairkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar akan diberikan secara cash atau uang tunai kepada Bendahara Pemerintah Desa lokasi Bangun Desa dengan didampingi Kepala Desa dan dilakukan dalam satu tahap sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan Bangun Desa dengan membawa :

- A) Fotocopy KTP dengan menunjukkan KTP asli
- B) Proposal atau Rencana Penggunaan dana Bantuan bangun Desa yang telah mendapat persetujuan dan verifikasi.

Selanjutnya bendahara Pemerintah Desa menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara panitia Pembangunan untuk pemanfaatannya sebagaimana ajuan dengan mengetahui Kepala Desa

(7) Pertanggungjawaban

- A) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (LPPD) dalam bentuk laporan realisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku antara lain meliputi : membuat pembukuan kas keluar masuk dana yang dilampiri kwitansi ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua Panitia mengetahui Kepala Desa serta lampiran nota pembelian
- B) LPPD dibuat rangkap 4 (empat) yaitu disampaikan kepada : Kepala BPMD Kab. Karanganyar, Kepala DPPKAD Kab. Karanganyar, Inspektur Kab. Karanganyar dan arsip desa

- e) Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Penataan Lingkungan dengan nilai bantuan sebesar Rp.30.000.000,- untuk setiap desa sebanyak 3 Desa se Kabupaten Karanganyar yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
- f) Bantuan Uang Duka Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g) Bantuan Jasa Pengabdian Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jabatan dan masa kerja.
- h) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa kegiatan :
  - (1) Pendampingan TMMD Sengkuyung I sebesar Rp. 145.000.000,- untuk Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso
  - (2) Pendampingan TMMD Sengkuyung II sebesar Rp. 145.000.000,- untuk Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso
- i) Bantuan Kegiatan Los Kios Pasar Desa bagi desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso sebesar Rp. 30.000.000,-
- j) Bantuan Keuangan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten.

e. Hibah

Pendapatan dalam bentuk uang yang berasal dari anggaran yang sah yang sesuai dengan peraturan perundangan.

**f. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat**

**2. Belanja**

**a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :**

- 1) Belanja Pegawai / penghasilan tetap;
- 2) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 3) Belanja Tunjangan
- 4) Belanja Subsidi
- 5) Belanja Hibah.
- 6) Belanja Bantuan Sosial
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga

**b. Belanja Langsung terdiri dari :**

- 1) Belanja pegawai.
  - a) Honorarium Aparat Desa
  - b) Honorarium Non Perangkat Desa
  - c) Jasa Pihak Ketiga.
  - d) Uang Lembur
- 2) Belanja barang dan jasa.
  - a) Belanja Bahan Pakai Habis (ATK);
  - b) Belanja Bahan Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya;
  - c) Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon dan dokumentasi);
  - d) Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
  - f) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor;
  - g) Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor;
  - h) Belanja Makan dan Minum;
  - i) Belanja Sewa Alat Berat;
  - j) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
  - k) Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja;
  - l) Belanja Perjalanan Dinas;
- 3) Belanja Modal
  - a) Belanja Modal Pengadaan Tanah;
  - b) Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
  - c) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air;
  - d) Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi;
  - e) Belanja Modal Pembangunan/Rehab:
    - (1) Gedung
    - (2) Jalan
    - (3) Jembatan
  - f) Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan.

**c. Pembiayaan**

Pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan .
  - a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
  - b) Transfer Dana Cadangan
  - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - d) Penerimaan pinjaman Desa
  - e) Penerimaan Piutang Desa
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

- a) Pembentukan Dana Cadangan
- b) Penyertaan modal/investasi
- c) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
- d) Pemberian pinjaman

## II PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DESA.

### A. DPA Pendapatan.

Masing-masing jenis Pendapatan dibuat DPA tersendiri  
Pendapatan Desa yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa;
  - a. Hasil Usaha Desa;
  - b. Hasil Kekayaan Desa;
    - 1) Hasil Tanah Kas Desa;
    - 2) Hasil Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 3) Hasil Pasar/Kios Desa;
    - 4) Hasil/Sewa Bangunan Desa;
    - 5) Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
  - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.
  - d. Hasil Gotong Royong.
  - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
    - 1) Pungutan Desa Surat Keterangan;
    - 2) Pungutan Desa Legalisasi Surat-Surat;
    - 3) Pungutan Desa Surat Pengantar Permohonan Ijin;
    - 4) Perolehan Jasa Bank
    - 5) Pungutan Desa Lainnya;
2. Pendapatan bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
  - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah
3. Pendapatan Alokasi Dana Desa  
Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersangkutan
4. Pendapatan Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
  - a. Bantuan Pemerintah;
  - b. Bantuan Pemerintah Provinsi;
  - c. Bantuan Pemerintah Kabupaten.
5. Pendapatan Hibah
6. Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

### B. DPA Belanja

1. Belanja Tidak langsung yang terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
    - 1) Belanja Penghasilan Tetap Hasil Tanah Bengkok.
    - 2) Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- b. Belanja Kesejahteraan Aparat desa;
    - 1) Bantuan Biaya Pengobatan
    - 2) Tunjangan Hari Raya Atau Sebutan Lainnya
    - 3) Uang Duka
    - 4) Jasa Pengabdian
    - 5) Dst.....
  - c. Belanja Tunjangan;
    - 1) Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - 2) Tunjangan Kinerja Sekdes PNS
    - 3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD.
    - 4) Tunjangan lainnya sesuai ketentuan.
  - e. Belanja Subsidi;
    - 1) Belanja Subsidi kepada UKM.
    - 2) Belanja Subsidi lainnya.
  - f. Belanja Hibah;
 

Pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat atau pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
  - g. Belanja Bantuan Sosial;
    - 1) Belanja bantuan sosial kepada masyarakat.
    - 2) Belanja bantuan sosial lainnya.
  - h. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya;
    - 1) Belanja Bantuan Stimulan Pembangunan
    - 2) Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Desa Untuk Pemberdayaan
    - 3) Bantuan Keuangan lainnya
  - i. Belanja Tidak Terduga.
    - 1) Belanja bencana alam.
    - 2) Belanja bantuan bencana sosial
    - 3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa sebelumnya.
2. Belanja Langsung
- DPA Belanja Langsung dibuat untuk masing-masing kegiatan. Pengelompokan Program, Kegiatan dan jenis Belanja ditentukan sebagai berikut :
- a. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Desa.
 

Jenis Kegiatan :

    - 1) Peningkatan pelayanan administrasi Desa terdiri dari jenis belanja :
      - a) Belanja Barang Pakai Habis (ATK)
      - b) Belanja Bahan Materai/Benda Pos;
      - c) Belanja jasa kantor (Rekening listrik, Telepon, Air)
      - d) Belanja cetak dan penggandaan;
      - e) Belanja Perawatan kendaraan;
      - f) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor;
      - g) Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
      - h) Belanja Makan minum;
      - i) Belanja Sewa Peralatan;
      - j) Belanja Perjalanan Dinas.
    - 2) Pengadaan Pakaian Dinas;
    - 3) Pelaksanaan Lomba Desa;
    - 4) Pengelolaan ADD.
    - 5) Dst .....

- c Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah Desa dan BPD.

Jenis kegiatan :

- 1) Peningkatan kinerja BPD;
- 2) Pembinaan Perangkat Desa;
- 3) Dst .....

- d Program optimalisasi Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Jenis kegiatan :

- 1) Lelang Tanah Kas Desa;
- 2) Inventarisasi aset desa dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa;
- 3) Intensifikasi Pajak dan Retribusi;
- 4) Dst .....

- e Program Penyusunan Produk Hukum Desa.

Jenis kegiatan :

- 1) Penyusunan APB Desa, Perubahan dan Pertanggungjawaban APB Desa;
- 2) Rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Desa dan BPD.
- 3) Dst.....

- f Program Peningkatan kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Jenis kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan hari besar;
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dst .....

- g Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemerintahan, Perekonomian, Perhubungan, Sosial, Keamanan dan Ketertiban.

Jenis kegiatan :

- 1) Pengadaan Tanah;
- 2) Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
- 3) Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air;
- 4) Pengadaan Alat Komunikasi;
- 5) Pembangunan/Rehab :
  - a) Gedung
  - b) Jalan
  - c) Jembatan
- 6) Pengadaan Buku Perpustakaan;
- 7) Dst.....

### III PELAKSANAAN APE Desa

#### A Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa di PD. BPR-BKK/BKK Kecamatan.
2. Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (bukti setor seperti tersebut dalam lampiran).
3. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan

5. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan Desa.
6. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
7. Semua pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dimasukkan dalam rekening Kas Desa dan dicatat sebagai pendapatan Desa.

## **B Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa**

1. Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APB Desa diajukan oleh Pimpinan Kegiatan kepada Bendahara Desa;
2. Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
3. Sekretaris Desa meneliti ajuan SPP dari Bendahara Desa untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pemegang Rekening Kas Desa (BPR-BKK/BKK) diketahui Camat;
4. Camat memberikan Surat Rekomendasi Pencairan dana bantuan keuangan kepada Desa;
5. Sebagai pertanggung jawaban setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
6. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
7. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa kecuali Belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib.
8. Belanja Desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa (ATK, Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan air serta Perjalanan Dinas).
9. Belanja Desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.
10. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
11. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Kepala Desa.
12. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Desa.
13. Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial serta pengeluaran atas kelebihan penyeteroran ke Kas Desa pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

14. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Tanggap Darurat Bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari Kepala Dusun;
  - b. Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa membuat pernyataan bencana alam/sosial;
  - c. Pengambilan Anggaran Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - d. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD.
15. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga atas kelebihan setor ke Kas Desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Laporan dari Pimpinan Kegiatan/Bendahara Desa tentang kelebihan setoran ke Kas Desa;
  - b. Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dilakukan Audit terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran tahun yang bersangkutan.

**C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa**

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - a. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
2. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa.
3. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
4. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
5. Untuk pelaksanaan kegiatan Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke Kas Desa.
6. Pemindahbukuan atau pengembalian Dana Cadangan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
7. Pemindahbukuan atau pengembalian dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.
8. Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan atau Kas Desa tersendiri, dipindahbukukan ke rekening Kas Desa atau dikembalikan ke Kas Desa.
9. Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
10. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah Dana Cadangan.
11. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
12. Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

#### **IV PERUBAHAN APB Desa**

- A. Perubahan APB Desa dilakukan apabila terjadi:
1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  2. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  3. Adanya perubahan pendapatan dan belanja;
- B. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- C. Pergeseran antar kelompok belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APB Desa sedangkan pergeseran antar jenis belanja dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- E. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dapat digunakan untuk:
1. Mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
  2. Mendanai kegiatan lanjutan;
  3. Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;
  4. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.
- F. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- G. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- H. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disetujui bersama paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- I. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Bupati dilakukan setelah APB Desa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- J. Hasil Evaluasi dari Bupati dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan paling lama 20 hari kerja kepada Kepala Desa yang selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

#### **V. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB Desa**

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa adalah sebagai berikut

- A. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- B. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dimaksud setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan memperoleh persetujuan bersama.
- C. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa dilakukan 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

- D. Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APB Desa.
- E. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- F. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud BPD belum memberikan persetujuan, Kepala Desa mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- G. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa sejak diterima;
- H. Apabila dalam jangka waktu evaluasi, Bupati belum menyampaikan hasil evaluasi, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- I. Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- J. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Bupati menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**VI. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

- A. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.
- B. Penyampaian Peraturan Desa dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

**BUPATI KARANGANYAR**

**Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR : II TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 JANUARI 2011

**PENETAPAN BESARAN ADD  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011**

| NO. | KECAMATAN<br>DESA | ADD MINIMAL<br>(60%) | ADD PROPORSIONAL<br>(40%) | TOTAL ADD   | TOTAL ADD<br>DIBULATKAN | TAHAPAN PENCAIRAN |                   |
|-----|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                   |                      |                           |             |                         | TAHAP I<br>(60%)  | TAHAP II<br>(40%) |
| I   | JATIPURO          | 259,259,259.30       | 159,605,485               | 418,864,744 | 418,870,000             | 251,322,000       | 167,548,000       |
| 1   | NGEPUNGSARI       | 25,925,925.93        | 17,653,308                | 43,579,233  | 43,580,000              | 26,148,000        | 17,432,000        |
| 2   | JATIPURWO         | 25,925,925.93        | 22,145,191                | 48,071,117  | 48,070,000              | 28,842,000        | 19,228,000        |
| 3   | JATIPURO          | 25,925,925.93        | 13,696,394                | 39,622,320  | 39,625,000              | 23,775,000        | 15,850,000        |
| 4   | JATISOBO          | 25,925,925.93        | 16,833,145                | 44,759,071  | 44,755,000              | 26,853,000        | 17,902,000        |
| 5   | JATIWARNO         | 25,925,925.93        | 15,452,686                | 41,378,612  | 41,380,000              | 24,828,000        | 16,552,000        |
| 6   | JATIMULYO         | 25,925,925.93        | 20,865,935                | 46,791,861  | 46,790,000              | 28,074,000        | 18,716,000        |
| 7   | JATISUKO          | 25,925,925.93        | 9,304,076                 | 35,230,002  | 35,230,000              | 21,138,000        | 14,092,000        |
| 8   | JATIHARJO         | 25,925,925.93        | 14,041,092                | 39,967,018  | 39,970,000              | 23,982,000        | 15,988,000        |
| 9   | JATIKIJWUNG       | 25,925,925.93        | 10,477,840                | 36,403,766  | 36,410,000              | 21,846,000        | 14,564,000        |
| 10  | JATIROYO          | 25,925,925.93        | 17,135,818                | 43,061,744  | 43,060,000              | 25,936,000        | 17,224,000        |
| II  | JATIIYOSO         | 233,333,333.37       | 173,749,248               | 407,082,581 | 407,075,000             | 244,245,000       | 162,830,000       |
| 1   | JATISAWIT         | 25,925,925.93        | 16,024,761                | 41,950,687  | 41,950,000              | 25,170,000        | 16,780,000        |
| 2   | PETUNG            | 25,925,925.93        | 18,475,877                | 44,401,803  | 44,400,000              | 26,640,000        | 17,760,000        |
| 3   | WONOKELING        | 25,925,925.93        | 23,818,492                | 49,744,418  | 49,745,000              | 29,847,000        | 19,898,000        |
| 4   | JATIIYOSO         | 25,925,925.93        | 17,252,716                | 43,178,642  | 43,175,000              | 25,905,000        | 17,270,000        |
| 5   | TLOBO             | 25,925,925.93        | 14,621,277                | 40,547,203  | 40,545,000              | 24,327,000        | 16,218,000        |
| 6   | WONOREJO          | 25,925,925.93        | 25,055,490                | 50,981,416  | 50,980,000              | 30,588,000        | 20,392,000        |
| 7   | BERUK             | 25,925,925.93        | 22,461,476                | 48,387,402  | 48,385,000              | 29,031,000        | 19,354,000        |
| 8   | KARANGSARI        | 25,925,925.93        | 16,615,109                | 42,541,035  | 42,545,000              | 25,527,000        | 17,018,000        |
| 9   | WUKIRSAWIT        | 25,925,925.93        | 19,424,050                | 45,349,976  | 45,350,000              | 27,210,000        | 18,140,000        |
| III | JUMAPOLO          | 311,111,111.16       | 192,766,865               | 503,877,976 | 503,890,000             | 302,334,000       | 201,556,000       |
| 1   | PASEBAN           | 25,925,925.93        | 20,059,164                | 45,985,090  | 45,985,000              | 27,591,000        | 18,394,000        |
| 2   | LEMAHBANG         | 25,925,925.93        | 10,215,363                | 36,141,289  | 36,150,000              | 21,690,000        | 14,460,000        |
| 3   | KARANGBANGUN      | 25,925,925.93        | 9,818,266                 | 35,744,192  | 35,750,000              | 21,450,000        | 14,300,000        |
| 4   | PLOSO             | 25,925,925.93        | 16,272,102                | 42,198,028  | 42,195,000              | 25,317,000        | 16,878,000        |
| 5   | GIRIWONDO         | 25,925,925.93        | 13,854,213                | 39,780,138  | 39,780,000              | 23,868,000        | 15,912,000        |
| 6   | KADIPIRO          | 25,925,925.93        | 18,747,059                | 44,672,985  | 44,670,000              | 26,802,000        | 17,868,000        |
| 7   | JUMANTORO         | 25,925,925.93        | 19,736,583                | 45,662,509  | 45,660,000              | 27,396,000        | 18,264,000        |
| 8   | KEDAWUNG          | 25,925,925.93        | 16,175,060                | 42,100,986  | 42,100,000              | 25,260,000        | 16,840,000        |
| 9   | BAKALAN           | 25,925,925.93        | 11,960,169                | 37,886,094  | 37,890,000              | 22,734,000        | 15,156,000        |
| 10  | JUMAPOLO          | 25,925,925.93        | 23,210,039                | 49,135,965  | 49,135,000              | 29,481,000        | 19,654,000        |
| 11  | KWANGSAN          | 25,925,925.93        | 20,722,102                | 46,648,028  | 46,645,000              | 27,987,000        | 18,658,000        |
| 12  | JATIREJO          | 25,925,925.93        | 11,996,746                | 37,922,672  | 37,930,000              | 22,758,000        | 15,172,000        |

| NO. | KECAMATAN<br>DESA | ADD MINIMAL<br>(60%) | ADD PROPORSIONAL<br>(40%) | TOTAL ADD   | TOTAL ADD<br>DIBULATKAN | TAHAPAN PENCAIRAN  |                     |
|-----|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|     |                   |                      |                           |             |                         | TAHAP I<br>( 60% ) | TAHAP II<br>( 40% ) |
| IV  | JUMANTONO         | 285,185,185.23       | 166,737,899               | 451,923,084 | 451,920,000             | 271,152,000        | 180,768,000         |
| 1   | SEDAYU            | 25,925,925.93        | 17,501,309                | 43,427,235  | 43,425,000              | 26,055,000         | 17,370,000          |
| 2   | KEBAK             | 25,925,925.93        | 17,271,293                | 43,197,219  | 43,195,000              | 25,917,000         | 17,278,000          |
| 3   | GEMANTAR          | 25,925,925.93        | 18,976,225                | 44,902,151  | 44,900,000              | 26,940,000         | 17,960,000          |
| 4   | TUNGGULREJO       | 25,925,925.93        | 14,287,944                | 40,213,870  | 40,210,000              | 24,126,000         | 16,084,000          |
| 5   | GENENGAN          | 25,925,925.93        | 15,365,249                | 41,291,175  | 41,290,000              | 24,774,000         | 16,516,000          |
| 6   | NGUNUT            | 25,925,925.93        | 10,311,654                | 36,237,580  | 36,240,000              | 21,744,000         | 14,496,000          |
| 7   | TUGU              | 25,925,925.93        | 11,333,490                | 37,259,416  | 37,250,000              | 22,356,000         | 14,904,000          |
| 8   | SUKOSARI          | 25,925,925.93        | 12,017,032                | 37,942,958  | 37,945,000              | 22,767,000         | 15,178,000          |
| 9   | SAMBIREJO         | 25,925,925.93        | 8,762,014                 | 34,687,940  | 34,690,000              | 20,814,000         | 13,876,000          |
| 10  | BLOKONG           | 25,925,925.93        | 18,340,749                | 44,266,675  | 44,265,000              | 26,559,000         | 17,706,000          |
| 11  | SRINGIN           | 25,925,925.93        | 22,570,940                | 48,496,866  | 48,500,000              | 29,100,000         | 19,400,000          |
| V   | MATESIH           | 233,333,333.37       | 162,372,503               | 395,705,836 | 395,685,000             | 237,411,000        | 158,274,000         |
| 1   | NGADILUWIH        | 25,925,925.93        | 21,022,450                | 46,948,376  | 46,950,000              | 28,170,000         | 18,780,000          |
| 2   | DAWUNG            | 25,925,925.93        | 17,150,577                | 43,076,503  | 43,075,000              | 25,845,000         | 17,230,000          |
| 3   | MATESIH           | 25,925,925.93        | 21,537,897                | 47,463,823  | 47,460,000              | 28,476,000         | 18,984,000          |
| 4   | KARANGBANGUN      | 25,925,925.93        | 16,557,629                | 42,483,555  | 42,480,000              | 25,488,000         | 16,992,000          |
| 5   | KORIPAN           | 25,925,925.93        | 15,168,897                | 41,094,822  | 41,090,000              | 24,654,000         | 16,436,000          |
| 6   | GIRILAYU          | 25,925,925.93        | 16,684,756                | 42,610,681  | 42,610,000              | 25,566,000         | 17,044,000          |
| 7   | PABLENGAN         | 25,925,925.93        | 20,418,970                | 46,344,896  | 46,340,000              | 27,804,000         | 18,536,000          |
| 8   | PLOSOREJO         | 25,925,925.93        | 17,675,747                | 43,601,673  | 43,600,000              | 26,160,000         | 17,440,000          |
| 9   | GANTIWARNO        | 25,925,925.93        | 16,155,580                | 42,081,506  | 42,080,000              | 25,248,000         | 16,832,000          |
| VI  | TAWANGMANGU       | 181,481,481.51       | 152,732,967               | 334,214,449 | 334,210,000             | 200,526,000        | 133,684,000         |
| 1   | BANDARDAWUNG      | 25,925,925.93        | 19,384,408                | 45,310,334  | 45,310,000              | 27,186,000         | 18,124,000          |
| 2   | SEPANJANG         | 25,925,925.93        | 19,574,312                | 45,500,238  | 45,500,000              | 27,300,000         | 18,200,000          |
| 3   | GONDOSULI         | 25,925,925.93        | 25,521,912                | 51,447,838  | 51,445,000              | 30,867,000         | 20,578,000          |
| 4   | TENGLIK           | 25,925,925.93        | 22,830,310                | 48,756,236  | 48,760,000              | 29,256,000         | 19,504,000          |
| 5   | NGLEBAK           | 25,925,925.93        | 27,169,436                | 53,095,362  | 53,090,000              | 31,854,000         | 21,236,000          |
| 6   | KARANGLO          | 25,925,925.93        | 18,137,058                | 44,062,984  | 44,065,000              | 26,439,000         | 17,626,000          |
| 7   | PLUMBON           | 25,925,925.93        | 20,115,531                | 46,041,457  | 46,040,000              | 27,624,000         | 18,416,000          |
| VII | NGARGOYOSO        | 233,333,333.37       | 125,569,645               | 358,902,979 | 358,910,000             | 215,346,000        | 143,564,000         |
| 1   | PUNTUKREJO        | 25,925,925.93        | 11,565,712                | 37,491,638  | 37,495,000              | 22,497,000         | 14,998,000          |
| 2   | BERJO             | 25,925,925.93        | 18,013,245                | 43,939,171  | 43,940,000              | 26,364,000         | 17,576,000          |
| 3   | GIRIMULYO         | 25,925,925.93        | 12,511,232                | 38,437,158  | 38,440,000              | 23,064,000         | 15,376,000          |
| 4   | SEGOROGUNUNG      | 25,925,925.93        | 13,439,868                | 39,365,794  | 39,365,000              | 23,619,000         | 15,746,000          |
| 5   | KEMUNING          | 25,925,925.93        | 20,469,825                | 46,395,751  | 46,395,000              | 27,837,000         | 18,558,000          |
| 6   | NGLEGOK           | 25,925,925.93        | 16,377,944                | 42,303,870  | 42,300,000              | 25,380,000         | 16,920,000          |
| 7   | DUKUJ             | 25,925,925.93        | 11,069,894                | 36,995,820  | 37,000,000              | 22,200,000         | 14,800,000          |
| 8   | JATIREJO          | 25,925,925.93        | 9,424,426                 | 35,350,352  | 35,350,000              | 21,210,000         | 14,140,000          |
| 9   | NGARGOYOSO        | 25,925,925.93        | 12,697,500                | 38,623,426  | 38,625,000              | 23,175,000         | 15,450,000          |

| NO.  | KECAMATAN<br>DESA | ADD MINIMAL<br>(60%) | ADD PROPORSIONAL<br>(40%) | TOTAL ADD   | TOTAL ADD<br>DIBULATKAN | TAHAPAN PENCAIRAN  |                     |
|------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|      |                   |                      |                           |             |                         | TAHAP I<br>( 60% ) | TAHAP II<br>( 40% ) |
| VIII | KARANGPANDAN      | 285,185,185.23       | 138,535,396               | 423,720,581 | 423,730,000             | 254,238,000        | 169,492,000         |
| 1    | BANGSRI           | 25,925,925.93        | 12,497,308                | 38,423,234  | 38,420,000              | 23,052,000         | 15,368,000          |
| 2    | NGEMPLAK          | 25,925,925.93        | 13,771,299                | 39,697,225  | 39,700,000              | 23,820,000         | 15,880,000          |
| 3    | DOPLANG           | 25,925,925.93        | 13,264,975                | 39,190,901  | 39,190,000              | 23,514,000         | 15,676,000          |
| 4    | GERDU             | 25,925,925.93        | 14,760,020                | 40,685,946  | 40,685,000              | 24,411,000         | 16,274,000          |
| 5    | KARANG            | 25,925,925.93        | 12,552,942                | 38,478,868  | 38,480,000              | 23,088,000         | 15,392,000          |
| 6    | SALAM             | 25,925,925.93        | 11,458,863                | 37,384,789  | 37,390,000              | 22,434,000         | 14,956,000          |
| 7    | KARANGPANDAN      | 25,925,925.93        | 12,475,436                | 38,401,362  | 38,400,000              | 23,040,000         | 15,360,000          |
| 8    | TOHKUNING         | 25,925,925.93        | 12,838,434                | 38,764,360  | 38,765,000              | 23,259,000         | 15,506,000          |
| 9    | GONDANGMANIS      | 25,925,925.93        | 12,353,516                | 38,279,442  | 38,280,000              | 22,968,000         | 15,312,000          |
| 10   | DAYU              | 25,925,925.93        | 10,971,826                | 36,897,752  | 36,900,000              | 22,140,000         | 14,760,000          |
| 11   | HARJOSARI         | 25,925,925.93        | 11,590,776                | 37,516,702  | 37,520,000              | 22,512,000         | 15,008,000          |
| IX   | TASIKMADU         | 259,259,259.30       | 187,735,080               | 446,994,339 | 446,990,000             | 268,194,000        | 178,796,000         |
| 1    | BURAN             | 25,925,925.93        | 15,857,700                | 41,783,626  | 41,780,000              | 25,068,000         | 16,712,000          |
| 2    | PAPAHAN           | 25,925,925.93        | 12,532,580                | 38,458,506  | 38,460,000              | 23,076,000         | 15,384,000          |
| 3    | NGIJO             | 25,925,925.93        | 19,121,108                | 45,047,034  | 45,050,000              | 27,030,000         | 18,020,000          |
| 4    | GAUM              | 25,925,925.93        | 16,671,150                | 42,597,076  | 42,600,000              | 25,560,000         | 17,040,000          |
| 5    | SURUH             | 25,925,925.93        | 22,502,502                | 48,428,428  | 48,430,000              | 29,058,000         | 19,372,000          |
| 6    | PANDEYAN          | 25,925,925.93        | 20,034,174                | 45,960,100  | 45,960,000              | 27,576,000         | 18,384,000          |
| 7    | KARANGMOJO        | 25,925,925.93        | 23,926,898                | 49,852,824  | 49,850,000              | 29,910,000         | 19,940,000          |
| 8    | KALING            | 25,925,925.93        | 22,956,490                | 48,882,416  | 48,880,000              | 29,328,000         | 19,552,000          |
| 9    | WONOLOPO          | 25,925,925.93        | 16,695,539                | 42,621,465  | 42,620,000              | 25,572,000         | 17,048,000          |
| 10   | KALIJIRAK         | 25,925,925.93        | 17,436,938                | 43,362,864  | 43,360,000              | 26,016,000         | 17,344,000          |
| XI   | JATEN             | 207,407,407.44       | 202,486,523               | 409,893,931 | 409,875,000             | 245,925,000        | 163,950,000         |
| 1    | SURUHKALANG       | 25,925,925.93        | 16,364,267                | 42,290,193  | 42,290,000              | 25,374,000         | 16,916,000          |
| 2    | JATI              | 25,925,925.93        | 17,751,163                | 43,677,089  | 43,675,000              | 26,205,000         | 17,470,000          |
| 3    | JATEN             | 25,925,925.93        | 21,517,730                | 47,443,656  | 47,440,000              | 28,464,000         | 18,976,000          |
| 4    | DAGEN             | 25,925,925.93        | 17,160,261                | 43,086,187  | 43,085,000              | 25,851,000         | 17,234,000          |
| 5    | NGRINGO           | 25,925,925.93        | 60,888,368                | 86,814,294  | 86,810,000              | 52,086,000         | 34,724,000          |
| 6    | JETIS             | 25,925,925.93        | 24,853,244                | 50,779,170  | 50,780,000              | 30,468,000         | 20,312,000          |
| 7    | SROYO             | 25,925,925.93        | 21,982,433                | 47,908,359  | 47,900,000              | 28,740,000         | 19,160,000          |
| 8    | BRUJUL            | 25,925,925.93        | 21,969,056                | 47,894,982  | 47,895,000              | 28,737,000         | 19,158,000          |
| XII  | COLOMADU          | 285,185,185.23       | 170,080,937               | 455,266,122 | 455,270,000             | 273,162,000        | 182,108,000         |
| 1    | NGASEM            | 25,925,925.93        | 18,641,759                | 44,567,685  | 44,565,000              | 26,739,000         | 17,826,000          |
| 2    | BOLON             | 25,925,925.93        | 18,173,953                | 44,099,879  | 44,100,000              | 26,460,000         | 17,640,000          |
| 3    | MALANGJIWAN       | 25,925,925.93        | 20,558,473                | 46,484,399  | 46,485,000              | 27,891,000         | 18,594,000          |
| 4    | PAULAN            | 25,925,925.93        | 10,985,712                | 36,911,638  | 36,920,000              | 22,152,000         | 14,768,000          |
| 5    | GAJAHAN           | 25,925,925.93        | 12,594,024                | 38,519,950  | 38,520,000              | 23,112,000         | 15,408,000          |
| 6    | BLULUKAN          | 25,925,925.93        | 14,401,717                | 40,327,643  | 40,325,000              | 24,195,000         | 16,130,000          |
| 7    | GAWANAN           | 25,925,925.93        | 16,493,044                | 42,418,970  | 42,415,000              | 25,449,000         | 16,966,000          |
| 8    | GEDONGAN          | 25,925,925.93        | 15,386,398                | 41,312,324  | 41,310,000              | 24,786,000         | 16,524,000          |
| 9    | TOHUDAN           | 25,925,925.93        | 12,433,752                | 38,359,678  | 38,360,000              | 23,016,000         | 15,344,000          |
| 10   | BATURAN           | 25,925,925.93        | 17,725,107                | 43,651,033  | 43,650,000              | 26,190,000         | 17,460,000          |
| 11   | KLODRAN           | 25,925,925.93        | 12,686,996                | 38,612,922  | 38,620,000              | 23,172,000         | 15,448,000          |

| NO.  | KECAMATAN<br>DESA | ADD MINIMAL<br>(60%) | ADD PROPORSIONAL<br>(40%) | TOTAL ADD   | TOTAL ADD<br>DIBULATKAN | TAHAPAN PENCAIRAN  |                     |
|------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|      |                   |                      |                           |             |                         | TAHAP I<br>( 60% ) | TAHAP II<br>( 40% ) |
| XIII | GONDANGREJO       | 337,037,037.09       | 184,344,854               | 521,381,891 | 521,410,000             | 312,846,000        | 208,564,000         |
| 1    | WONOREJO          | 25,925,925.93        | 16,813,861                | 42,739,787  | 42,740,000              | 25,644,000         | 17,096,000          |
| 2    | PLESUNGAN         | 25,925,925.93        | 12,965,821                | 38,891,747  | 38,900,000              | 23,340,000         | 15,560,000          |
| 3    | JATIKUWUNG        | 25,925,925.93        | 10,686,386                | 36,612,312  | 36,615,000              | 21,969,000         | 14,646,000          |
| 4    | SELOKATON         | 25,925,925.93        | 15,048,397                | 40,974,323  | 40,975,000              | 24,585,000         | 16,390,000          |
| 5    | BULUREJO          | 25,925,925.93        | 14,504,906                | 40,430,832  | 40,430,000              | 24,258,000         | 16,172,000          |
| 6    | REJOSARI          | 25,925,925.93        | 11,856,215                | 37,782,141  | 37,790,000              | 22,674,000         | 15,116,000          |
| 7    | JERUKSAWIT        | 25,925,925.93        | 10,093,896                | 36,019,822  | 36,020,000              | 21,612,000         | 14,408,000          |
| 8    | KARANGTURI        | 25,925,925.93        | 13,720,109                | 39,646,035  | 39,660,000              | 23,796,000         | 15,864,000          |
| 9    | KRAGAN            | 25,925,925.93        | 12,345,299                | 38,271,224  | 38,270,000              | 22,962,000         | 15,308,000          |
| 10   | WONOSARI          | 25,925,925.93        | 10,794,449                | 36,720,374  | 36,720,000              | 22,032,000         | 14,688,000          |
| 11   | DAYU              | 25,925,925.93        | 18,329,661                | 44,255,587  | 44,255,000              | 26,553,000         | 17,702,000          |
| 12   | TUBAN             | 25,925,925.93        | 18,254,888                | 44,180,814  | 44,180,000              | 26,508,000         | 17,672,000          |
| 13   | KRENDOWAHONO      | 25,925,925.93        | 18,930,967                | 44,856,893  | 44,855,000              | 26,913,000         | 17,942,000          |
| XIV  | KEBAKKRAMAT       | 259,259,259.30       | 212,504,539               | 471,763,798 | 471,755,000             | 283,053,000        | 188,702,000         |
| 1    | KEMIRI            | 25,925,925.93        | 22,573,625                | 48,499,551  | 48,500,000              | 29,100,000         | 19,400,000          |
| 2    | NANGSRI           | 25,925,925.93        | 23,804,895                | 49,730,821  | 49,730,000              | 29,838,000         | 19,892,000          |
| 3    | MACANAN           | 25,925,925.93        | 23,459,146                | 49,385,072  | 49,385,000              | 29,631,000         | 19,754,000          |
| 4    | ALASTUWO          | 25,925,925.93        | 16,483,546                | 42,409,472  | 42,410,000              | 25,446,000         | 16,964,000          |
| 5    | BANJARHARJO       | 25,925,925.93        | 20,095,452                | 46,021,378  | 46,020,000              | 27,612,000         | 18,408,000          |
| 6    | MALANGGATEN       | 25,925,925.93        | 20,745,907                | 46,671,833  | 46,670,000              | 28,002,000         | 18,668,000          |
| 7    | KALIWULUH         | 25,925,925.93        | 25,038,316                | 50,964,242  | 50,960,000              | 30,576,000         | 20,384,000          |
| 8    | PULOSARI          | 25,925,925.93        | 17,799,548                | 43,725,474  | 43,725,000              | 26,235,000         | 17,490,000          |
| 9    | KEBAK             | 25,925,925.93        | 17,505,334                | 43,431,260  | 43,430,000              | 26,058,000         | 17,372,000          |
| 10   | WARU              | 25,925,925.93        | 24,998,771                | 50,924,697  | 50,925,000              | 30,555,000         | 20,370,000          |
| XV   | MOJOGEDANG        | 337,037,037.09       | 252,919,352               | 589,956,390 | 589,960,000             | 353,976,000        | 235,984,000         |
| 1    | SEWUREJO          | 25,925,925.93        | 23,084,632                | 49,010,558  | 49,010,000              | 29,406,000         | 19,604,000          |
| 2    | NGADIREJO         | 25,925,925.93        | 23,745,772                | 49,671,697  | 49,670,000              | 29,802,000         | 19,868,000          |
| 3    | MOJOGEDANG        | 25,925,925.93        | 14,398,583                | 40,324,509  | 40,325,000              | 24,195,000         | 16,130,000          |
| 4    | POJOK             | 25,925,925.93        | 23,933,501                | 49,859,427  | 49,860,000              | 29,916,000         | 19,944,000          |
| 5    | MOJOROTO          | 25,925,925.93        | 10,727,175                | 36,653,101  | 36,660,000              | 21,996,000         | 14,664,000          |
| 6    | KALIBOTO          | 25,925,925.93        | 15,668,257                | 41,594,183  | 41,590,000              | 24,954,000         | 16,636,000          |
| 7    | BUNTAR            | 25,925,925.93        | 20,984,514                | 46,910,440  | 46,910,000              | 28,146,000         | 18,764,000          |
| 8    | GEBYOG            | 25,925,925.93        | 20,977,721                | 46,903,647  | 46,900,000              | 28,140,000         | 18,760,000          |
| 9    | GENTUNGAN         | 25,925,925.93        | 20,733,753                | 46,659,679  | 46,660,000              | 27,996,000         | 18,664,000          |
| 10   | PENDEM            | 25,925,925.93        | 15,729,084                | 41,655,010  | 41,660,000              | 24,996,000         | 16,664,000          |
| 11   | PERENG            | 25,925,925.93        | 19,308,184                | 45,234,110  | 45,235,000              | 27,141,000         | 18,094,000          |
| 12   | MUNGGUR           | 25,925,925.93        | 21,819,406                | 47,745,332  | 47,745,000              | 28,647,000         | 19,098,000          |
| 13   | KEDUNGJERUK       | 25,925,925.93        | 21,808,771                | 47,734,696  | 47,735,000              | 28,641,000         | 19,094,000          |

| NO.    | KECAMATAN<br>DESA | ADD MINIMAL<br>(60%) | ADD PROPORSIONAL<br>(40%) | TOTAL ADD     | TOTAL ADD<br>DIBULATKAN | TAHAPAN PENCAIRAN  |                     |
|--------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|        |                   |                      |                           |               |                         | TAHAP I<br>( 60% ) | TAHAP II<br>( 40% ) |
| XVI    | KERJO             | 259,259,259.30       | 159,499,659               | 418,758,918   | 418,760,000             | 251,256,000        | 167,504,000         |
| 1      | KUTO              | 25,925,925.93        | 18,727,107                | 44,653,033    | 44,650,000              | 26,790,000         | 17,860,000          |
| 2      | TAMANSARI         | 25,925,925.93        | 17,020,382                | 42,946,308    | 42,945,000              | 25,767,000         | 17,178,000          |
| 3      | GANTEN            | 25,925,925.93        | 18,142,131                | 44,068,056    | 44,065,000              | 26,439,000         | 17,626,000          |
| 4      | GEMPOLAN          | 25,925,925.93        | 14,851,869                | 40,777,795    | 40,780,000              | 24,468,000         | 16,312,000          |
| 5      | PLOSOREJO         | 25,925,925.93        | 19,123,437                | 45,049,363    | 45,050,000              | 27,030,000         | 18,020,000          |
| 6      | KARANGREJO        | 25,925,925.93        | 17,038,773                | 42,964,699    | 42,965,000              | 25,779,000         | 17,186,000          |
| 7      | KWADUNGAN         | 25,925,925.93        | 13,931,310                | 39,857,236    | 39,860,000              | 23,916,000         | 15,944,000          |
| 8      | BOTOK             | 25,925,925.93        | 11,036,567                | 36,962,492    | 36,965,000              | 22,179,000         | 14,786,000          |
| 9      | SUMBEREJO         | 25,925,925.93        | 12,287,018                | 38,212,944    | 38,215,000              | 22,929,000         | 15,286,000          |
| 10     | TAWANGSARI        | 25,925,925.93        | 17,341,066                | 43,266,991    | 43,265,000              | 25,959,000         | 17,306,000          |
| XVII   | JENAWI            | 233,333,333.37       | 158,359,048               | 391,692,381   | 391,690,000             | 235,014,000        | 156,676,000         |
| 1      | GUMENG            | 25,925,925.93        | 19,145,456                | 45,071,382    | 45,070,000              | 27,042,000         | 18,028,000          |
| 2      | ANGGRASMANIS      | 25,925,925.93        | 20,539,314                | 46,465,240    | 46,465,000              | 27,879,000         | 18,586,000          |
| 3      | JENAWI            | 25,925,925.93        | 16,726,734                | 42,652,659    | 42,655,000              | 25,593,000         | 17,062,000          |
| 4      | TRENGGULI         | 25,925,925.93        | 14,947,107                | 40,873,033    | 40,870,000              | 24,522,000         | 16,348,000          |
| 5      | SIDOMUKTI         | 25,925,925.93        | 16,920,763                | 42,846,689    | 42,845,000              | 25,707,000         | 17,138,000          |
| 6      | BALONG            | 25,925,925.93        | 21,114,487                | 47,040,413    | 47,040,000              | 28,224,000         | 18,816,000          |
| 7      | SELOROMO          | 25,925,925.93        | 18,609,563                | 44,535,489    | 44,535,000              | 26,721,000         | 17,814,000          |
| 8      | MENJING           | 25,925,925.93        | 11,972,237                | 37,898,163    | 37,900,000              | 22,740,000         | 15,160,000          |
| 9      | LEMPONG           | 25,925,925.93        | 18,383,387                | 44,309,313    | 44,310,000              | 26,586,000         | 17,724,000          |
| JUMLAH |                   | 4,200,000,000        | 2,800,000,000             | 7,000,000,000 | 7,000,000,000           | 4,200,000,000      | 2,800,000,000       |

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : 11 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 JANUARI 2011

**PENETAPAN KLASIFIKASI DESA DAN BESARAN  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2011**

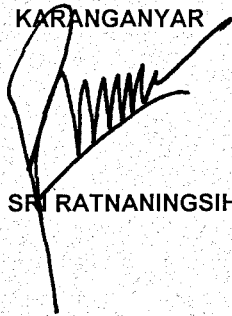
| NO. | KECAMATAN<br>(DESA) | KLASIFIKASI<br>DESA | PAJAK<br>DAERAH<br>(Rp) | RETRIBUSI<br>DAERAH<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| I   | TAWANGMANGU         |                     |                         |                             |                |
| 1   | Gondosuli           | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 2   | Sepanjang           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3   | Bandardawung        | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4   | Karanglo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5   | Nglebak             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6   | Plumbon             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7   | Tengklik            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|     | JUMLAH              |                     | 43,986,453              | 43,986,453                  | 87,972,906     |
| II  | KARANGPANDAN        |                     |                         |                             |                |
| 1   | Karangpandan        | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2   | Doplang             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3   | Ngemplak            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4   | Bangsri             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5   | Tohkuning           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6   | Gondangmanis        | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 7   | Dayu                | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8   | Harjosari           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 9   | Salam               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 10  | Gerdu               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 11  | Karang              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|     | JUMLAH              |                     | 69,812,813              | 69,812,813                  | 139,625,626    |
| III | KEC. NGARGOYOSO     |                     |                         |                             |                |
| 1   | Puntukrejo          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2   | Berjc               | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 3   | Girimulyo           | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 4   | Segorogunung        | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 5   | Kemuning            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6   | Ngargoyoso          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7   | Jatirejo            | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 8   | Dukuh               | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 9   | Nglegok             | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
|     | JUMLAH              |                     | 50,851,248              | 50,851,248                  | 101,702,496    |
| IV  | KEC. JENAWI         |                     |                         |                             |                |
| 1   | Gumeng              | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 2   | Anggrasmanis        | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 3   | Jenawi              | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 4   | Trengguli           | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 5   | Balong              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6   | Menjing             | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 7   | Seloromo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8   | Sidomukti           | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 9   | Lemping             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|     | JUMLAH              |                     | 50,851,248              | 50,851,248                  | 101,702,496    |
| V   | KEC. KERJO          |                     |                         |                             |                |
| 1   | Kuto                | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 2   | Tamansari           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3   | Ganten              | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 4   | Gempolan            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5   | Plosorejo           | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 6   | Karangrejo          | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 7   | Kwadungan           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8   | Botok               | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 9   | Sumberejo           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 10  | Tawang Sari         | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|     | JUMLAH              |                     | 58,517,515              | 58,517,515                  | 117,035,030    |

| NO.  | KECAMATAN<br>(DESA) | KLASIFIKASI<br>DESA | PAJAK<br>DAERAH<br>(Rp) | RETRIBUSI<br>DAERAH<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp) |
|------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| VI   | KEC. MOJOGEDANG     |                     |                         |                             |                |
| 1    | Mojogedang          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2    | Sewurejo            | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 3    | Ngadirejo           | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 4    | Pendem              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Pereng              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6    | Munggur             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7    | Kedungjeruk         | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8    | Kaliboto            | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 9    | Buntar              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 10   | Mojoroto            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 11   | Gebyog              | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 12   | Gentungan           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 13   | Pojok               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|      | JUMLAH              |                     | 79,096,962              | 79,096,962                  | 158,193,924    |
| VII  | KEC. TASIEMADU      |                     |                         |                             |                |
| 1    | Buran               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2    | Papahan             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3    | Ngijo               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4    | Gaum                | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Suruh               | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 6    | Pandeyan            | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 7    | Karangmojo          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8    | Kaling              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 9    | Wonolopo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 10   | Kalijirak           | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
|      | JUMLAH              |                     | 60,936,869              | 60,936,869                  | 121,873,738    |
| VIII | KEC. JATEN          |                     |                         |                             |                |
| 1    | Suruhkalang         | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2    | Jati                | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3    | Jaten               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4    | Dagen               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Ngringo             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6    | Jetis               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7    | Sroyo               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8    | Brujul              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|      | JUMLAH              |                     | 51,652,720              | 51,652,720                  | 103,305,440    |
| IX   | KEC. KEBAKKRAMAT    |                     |                         |                             |                |
| 1    | Kemiri              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2    | Kebak               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3    | Waru                | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4    | Pulosari            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Malanggaten         | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6    | Nangsri             | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 7    | Banjarharjo         | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8    | Alastuwo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 9    | Macanan             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 10   | Kaliwuluh           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|      | JUMLAH              |                     | 63,356,223              | 63,356,223                  | 126,712,446    |
| X    | KEC. COLOMADU       |                     |                         |                             |                |
| 1    | Ngasem              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2    | Bolon               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3    | Malangjiwan         | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4    | Gawanan             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Tohudan             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6    | Gedongan            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7    | Klodran             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8    | Baturan             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 9    | Bluluk              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 10   | Paulan              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 11   | Gajahan             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|      | JUMLAH              |                     | 71,022,490              | 71,022,490                  | 142,044,980    |

| NO.  | KECAMATAN<br>(DESA) | KLASIFIKASI<br>DESA | PAJAK<br>DAERAH<br>(Rp) | RETRIBUSI<br>DAERAH<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp) |
|------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| XI   | KEC. MATESIH        |                     |                         |                             |                |
| 1    | Ngadiluwih          | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 2    | Dawung              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3    | Matesih             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4    | Karangbangun        | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Koripan             | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 6    | Girilayu            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7    | Pablengan           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8    | Gantiwarno          | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 9    | Plosorejo           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|      | JUMLAH              |                     | 54,480,279              | 54,480,279                  | 108,960,558    |
| XII  | KEC. GONDANGREJO    |                     |                         |                             |                |
| 1    | Wonorejo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2    | Plesungan           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3    | Jatikuwung          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4    | Selokaton           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Bulurejo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6    | Rejosari            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7    | Jeruksawit          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8    | Karangturi          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 9    | Kragan              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 10   | Wonosari            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 11   | Dayu                | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 12   | Tuban               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 13   | Krendowahono        | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|      | JUMLAH              |                     | 83,935,670              | 83,935,670                  | 167,871,340    |
| XIII | KEC. JUMANTONO      |                     |                         |                             |                |
| 1    | Sedayu              | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 2    | Kebak               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3    | Gemantar            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4    | Genengan            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Tugu                | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 6    | Ngunut              | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 7    | Blorong             | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 8    | Sambirejo           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 9    | Tunggulrejo         | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 10   | Sukosari            | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
| 11   | Sringin             | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
|      | JUMLAH              |                     | 62,554,751              | 62,554,751                  | 125,109,502    |
| XIV  | KEC. JUMAPOLO       |                     |                         |                             |                |
| 1    | Paseban             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2    | Lemahbang           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3    | Jatirejo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4    | Kwangsan            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Karangbangun        | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6    | Ploso               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7    | Giriwondo           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8    | Kadipiro            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 9    | Jumantoro           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 10   | Kedawung            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 11   | Jumapolo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 12   | Bakalan             | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|      | JUMLAH              |                     | 77,479,080              | 77,479,080                  | 154,958,160    |
| XV   | KEC. JATIPURO       |                     |                         |                             |                |
| 1    | Ngepungsari         | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2    | Jatipurwo           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3    | Jatipuro            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4    | Jatisobo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5    | Jatiwarno           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6    | Jatimulyo           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7    | Jatisuko            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8    | Jatiharjo           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 9    | Jatikuwung          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 10   | Jatiroyo            | A                   | 5,246,913               | 5,246,913                   | 10,493,826     |
|      | JUMLAH              |                     | 53,356,223              | 63,356,223                  | 126,712,446    |

| NO. | KECAMATAN<br>(DESA) | KLASIFIKASI<br>DESA | PAJAK<br>DAERAH<br>(Rp) | RETRIBUSI<br>DAERAH<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp) |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| XVI | KEC. JATIIYOSO      |                     |                         |                             |                |
| 1   | Jatisawit           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 2   | Petung              | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 3   | Wonokeling          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 4   | Jatinyoso           | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 5   | Tlobo               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 6   | Wonorejo            | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 7   | Beruk               | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 8   | Karangsari          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
| 9   | Wukirsawit          | B                   | 6,456,590               | 6,456,590                   | 12,913,180     |
|     | JUMLAH              |                     | 58,109,310              | 58,109,310                  | 116,218,620    |
|     | TOTAL SE KABUPATEN  |                     | 999,999,854             | 999,999,854                 | 1,999,999,708  |

BUPATI KARANGANYAR



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR : 11 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 JANUARI 2011

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BALAI DESA /  
 GEDUNG SERBA GUNA / PAGAR BALAI DESA / TALUD /  
 GAPURO BALAI DESA TAHUN 2011**

| NO           | DESA        | KECAMATAN   | URAIAN                                         | BESARAN BANTUAN         |
|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | Pulosari    | Kebakkramat | Pembangunan Balai Desa                         | Rp 40,000,000           |
| 2            | Nangsri     | Kebakramat  | Pembangunan Pagar Balai Desa                   | Rp 50,000,000           |
| 3            | Nangsri     | Kebakramat  | Pavingisasi Halaman Balai Desa                 | Rp 50,000,000           |
| 4            | Alastuwo    | Kebakramat  | Pembangunan Balai Desa                         | Rp 90,000,000           |
| 5            | Alastuwo    | Kebakramat  | Pembuatan Pagar Balai Desa                     | Rp 10,000,000           |
| 6            | Jatiyoso    | Jatiyoso    | Pembangunan Talud, Pagar dan Gedung Balai Desa | Rp 165,000,000          |
| 7            | Wonorejo    | Jatiyoso    | Pembangunan Gedung Balai Desa                  | Rp 75,000,000           |
| 8            | Tlobo       | Jatiyoso    | Rehap Balai Desa                               | Rp 60,000,000           |
| 9            | Beruk       | Jatiyoso    | Perbaikan Lapangan Desa                        | Rp 30,000,000           |
| 10           | Gentungan   | Mojogedang  | Pembangunan Balai Desa                         | Rp 35,000,000           |
| 11           | Pendem      | Mojogedang  | MCK Kantor Balai Desa                          | Rp 30,000,000           |
| 12           | Pojok       | Mojogedang  | Rehap Gedung Balai Desa                        | Rp 30,000,000           |
| 13           | Mojoroto    | Mojogedang  | Pembangunan Lingkungan Balai Desa              | Rp 10,000,000           |
| 14           | Gaum        | Tasikmadu   | Pembangunan Balai Desa                         | Rp 50,000,000           |
| 15           | Wonolopo    | Tasikmadu   | Pembangunan Balai Desa                         | Rp 100,000,000          |
| 16           | Pandeyan    | Tasikmadu   | Pembangunan Balai Desa                         | Rp 50,000,000           |
| 17           | Jaten       | Jaten       | Pembangunan Pagar Kantor Desa                  | Rp 75,000,000           |
| 18           | Brujul      | Jaten       | Pembangunan Gapuro Balai Desa                  | Rp 40,000,000           |
| 19           | Jati        | Jaten       | Pembangunan Gedung Balai Desa                  | Rp 75,000,000           |
| 20           | Nglebak     | Tawangmangu | Pembangunan Balai Dusun Gondang                | Rp 30,000,000           |
| 21           | Plumbon     | Tawangmangu | Rehap Kantor Desa                              | Rp 50,000,000           |
| 22           | Ngepungsari | Jatipuro    | Pembangunan Balai Desa                         | Rp 25,000,000           |
| 23           | Girimulyo   | Ngargoyoso  | Rehap Gedung Serba Guna                        | Rp 25,000,000           |
| 24           | Gantiwarno  | Matesih     | Pembangunan Teras Balai Desa                   | Rp 6,500,000            |
| 25           | Giriwondo   | Jumapolo    | Pembangunan Kantor Desa                        | Rp 30,000,000           |
| 26           | Gumeng      | Jenawi      | Pembangunan Kantor Desa                        | Rp 50,000,000           |
| <b>TOTAL</b> |             |             |                                                | <b>Rp 1,281,500,000</b> |

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR : II TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 JANUARI 2011

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
 BANGUN DESA TAHUN 2011**

| NO           | DESA         | KECAMATAN    | BESARAN BANTUAN |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1            | Gedongan     | Colomadu     | Rp 30,000,000   |
| 2            | Gentungan    | Mojogedang   | Rp 30,000,000   |
| 3            | Sewurejo     | Mojogedang   | Rp 30,000,000   |
| 4            | Buntar       | Mojogedang   | Rp 30,000,000   |
| 5            | Gebyog       | Mojogedang   | Rp 30,000,000   |
| 6            | Jaten        | Jaten        | Rp 30,000,000   |
| 7            | Sedayu       | Jumantono    | Rp 30,000,000   |
| 8            | Wonolopo     | Tasikmadu    | Rp 30,000,000   |
| 9            | Kalijirak    | Tasikmadu    | Rp 30,000,000   |
| 10           | Kemuning     | Ngargoyoso   | Rp 30,000,000   |
| 11           | Anggrasmanis | Jenawi       | Rp 30,000,000   |
| 12           | Sidomukti    | Jenawi       | Rp 30,000,000   |
| 13           | Girilayu     | Matesih      | Rp 30,000,000   |
| 14           | Plosorejo    | Matesih      | Rp 30,000,000   |
| 15           | Jatisawit    | Jatiyoso     | Rp 30,000,000   |
| 16           | Tlobo        | Jatiyoso     | Rp 30,000,000   |
| 17           | Pulosari     | Kebakkramat  | Rp 30,000,000   |
| 18           | Macanan      | Kebakkramat  | Rp 30,000,000   |
| 19           | Alastuwo     | Kebakkramat  | Rp 30,000,000   |
| 20           | Plesungan    | Gondangrejo  | Rp 30,000,000   |
| 21           | Kragan       | Gondangrejo  | Rp 30,000,000   |
| 22           | Bakalan      | Jumapolo     | Rp 30,000,000   |
| 23           | Karangbangun | Jumapolo     | Rp 30,000,000   |
| 24           | Tamansari    | Kerjo        | Rp 30,000,000   |
| 25           | Salam        | Karangpandan | Rp 30,000,000   |
| 26           | Sepanjang    | Tawangmangu  | Rp 30,000,000   |
| 27           | Jatipurwo    | Jatipuro     | Rp 30,000,000   |
| <b>TOTAL</b> |              |              | Rp 810,000,000  |

BUPATI KARANGANYAR

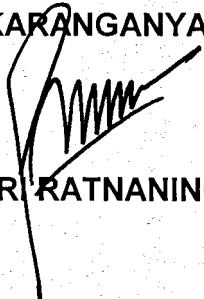
Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : 11 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 JANUARI 2011

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
PENATAAN LINGKUNGAN TAHUN 2011**

| NO    | DESA       | KECAMATAN | BESARAN BANTUAN |
|-------|------------|-----------|-----------------|
| 1     | Gantiwarno | Matesih   | Rp 30,000,000   |
| 2     | Ngadiluwih | Matesih   | Rp 30,000,000   |
| 3     | Gawanan    | Colomadu  | Rp 30,000,000   |
| TOTAL |            |           | Rp 90,000,000   |

BUPATI KARANGANYAR

  
Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : 11 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 JANUARI 2011

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
DESA BERKEMBANG TAHUN 2011**

| NO    | DESA         | KECAMATAN    | BESARAN BANTUAN  |
|-------|--------------|--------------|------------------|
| 1     | Berjo        | Ngargoyoso   | Rp 100,000,000   |
| 2     | Bangsri      | Karangpandan | Rp 100,000,000   |
| 3     | Harjosari    | Karangpandan | Rp 100,000,000   |
| 4     | Gemantar     | Jumantono    | Rp 100,000,000   |
| 5     | Wukirsawit   | Jatiyoso     | Rp 100,000,000   |
| 6     | Anggrasmanis | Jenawi       | Rp 100,000,000   |
| 7     | Jatisuko     | Jatipuro     | Rp 100,000,000   |
| 8     | Jatiharjo    | Jatipuro     | Rp 100,000,000   |
| 9     | Plosorejo    | Kerjo        | Rp 100,000,000   |
| 10    | Tamansari    | Kerjo        | Rp 100,000,000   |
| 11    | Malangjiwan  | Colomadu     | Rp 100,000,000   |
| 12    | Jati         | Jaten        | Rp 100,000,000   |
| 13    | Brujul       | Jaten        | Rp 100,000,000   |
| TOTAL |              |              | Rp 1,300,000,000 |

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR : 11 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 JANUARI 2011

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
 UNTUK SARANA PRASARANA KEARSIPAN TAHUN 2011**

| NO    | DESA         | KECAMATAN    | BESARAN BANTUAN |
|-------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | Klodran      | Colomadu     | Rp 2,000,000    |
| 2     | Baturan      | Colomadu     | Rp 2,000,000    |
| 3     | Jeruksawit   | Gondangrejo  | Rp 2,000,000    |
| 4     | Selokaton    | Gondangrejo  | Rp 2,000,000    |
| 5     | Plesungan    | Gondangrejo  | Rp 2,000,000    |
| 6     | Jatisuko     | Jatipuro     | Rp 2,000,000    |
| 7     | Jatiharjo    | Jatipuro     | Rp 2,000,000    |
| 8     | Jatiroyo     | Jatipuro     | Rp 2,000,000    |
| 9     | Wonorejo     | Jatiyoso     | Rp 2,000,000    |
| 10    | Karangsari   | Jatiyoso     | Rp 2,000,000    |
| 11    | Balong       | Jenawi       | Rp 2,000,000    |
| 12    | Seloromo     | Jenawi       | Rp 2,000,000    |
| 13    | Sambirejo    | Jumantono    | Rp 2,000,000    |
| 14    | Kebak        | Jumantono    | Rp 2,000,000    |
| 15    | Kedawung     | Jumapolo     | Rp 2,000,000    |
| 16    | Kwangsan     | Jumapolo     | Rp 2,000,000    |
| 17    | Jatirejo     | Jumapolo     | Rp 2,000,000    |
| 18    | Bakalan      | Jumapolo     | Rp 2,000,000    |
| 19    | Gerdu        | Karangpandan | Rp 2,000,000    |
| 20    | Salam        | Karangpandan | Rp 2,000,000    |
| 21    | Karang       | Karangpandan | Rp 2,000,000    |
| 22    | Macanan      | Kebakkramat  | Rp 2,000,000    |
| 23    | Waru         | Kebakkramat  | Rp 2,000,000    |
| 24    | Banjarharjo  | Kebakkramat  | Rp 2,000,000    |
| 25    | Gempolan     | Kerjo        | Rp 2,000,000    |
| 26    | Tawangsari   | Kerjo        | Rp 2,000,000    |
| 27    | Gantiwarno   | Matesih      | Rp 2,000,000    |
| 28    | Karangbangun | Matesih      | Rp 2,000,000    |
| 29    | Kedungjeruk  | Mojogedang   | Rp 2,000,000    |
| 30    | Pereng       | Mojogedang   | Rp 2,000,000    |
| 31    | Ngadirejo    | Mojogedang   | Rp 2,000,000    |
| 32    | Mojoroto     | Mojogedang   | Rp 2,000,000    |
| 33    | Pandeyan     | Tasikmadu    | Rp 2,000,000    |
| 34    | Kaling       | Tasikmadu    | Rp 2,000,000    |
| 35    | Wonolopo     | Tasikmadu    | Rp 2,000,000    |
| 36    | Nglebak      | Tawangmangu  | Rp 2,000,000    |
| 37    | Plumbon      | Tawangmangu  | Rp 2,000,000    |
| TOTAL |              |              | Rp 74,000,000   |

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : II TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 JANUARI 2011

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011**

| NO    | DESA        | KECAMATAN    | BESARAN BANTUAN |
|-------|-------------|--------------|-----------------|
| 1     | Berjo       | Ngargoyoso   | Rp 15,000,000   |
| 2     | Bangsri     | Karangpandan | Rp 15,000,000   |
| 3     | Harjosari   | Karangpandan | Rp 15,000,000   |
| 4     | Gemantar    | Jumantono    | Rp 15,000,000   |
| 5     | Wukirsawit  | Jatiyoso     | Rp 15,000,000   |
| 6     | Jatiharjo   | Jatipuro     | Rp 15,000,000   |
| 7     | Ngadirejo   | Mojogedang   | Rp 15,000,000   |
| 8     | Plosorejo   | Kerjo        | Rp 15,000,000   |
| 9     | Malangjiwan | Colomadu     | Rp 15,000,000   |
| 10    | Jati        | Jaten        | Rp 15,000,000   |
| 11    | Brujul      | Jaten        | Rp 15,000,000   |
| 12    | Kragan      | Gondangrejo  | Rp 15,000,000   |
| 13    | Gondosuli   | Tawangmangu  | Rp 15,000,000   |
| TOTAL |             |              | Rp 195,000,000  |

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SHI RATNANINGSIH, M.Hum